

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

### **DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *review* terhadap beberapa karya tulis terdahulu, untuk dapat membandingkan keakuratan, kebenaran, kejelasan suatu penelitian. Untuk itu penulis mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang akan dijadikan acuan untuk dipelajari lebih lanjut.

**Penelitian Pertama** dilakukan oleh Candraningtyas dan Wahyuni (2017) yang dimuat dalam jurnal *E-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 8.2* (2017) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap *Audit Delay*”. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan *ex post facto*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel berjumlah 29 perusahaan dari 41 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

**Penelitian Kedua** dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang dimuat dalam jurnal ISSN: 2302-8556 *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 5.2 (2013): 251-270 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP, dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif pendekatan *ex post facto*, metode pengambilan sampel menggunakan data sekunder. Teknik pengujian data penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi dan pengujian regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel *leverage*, komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan variabel profitabilitas, kompleksitas operasi dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

**Penelitian Ketiga** dilakukan oleh Amani (2016) yang dimuat dalam jurnal nominal Vol. 5.1 (2016) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan Terhadap *Audit Delay*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014.

Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan pendekatan *ex post facto*. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berjumlah 41 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Secara Simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

**Penelitian Keempat** dilakukan oleh Saemargani (2015) yang dimuat dalam jurnal nominal Vol. 4.2 (2015) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP dan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan *ex postfacto*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel berjumlah 14 perusahaan dari perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Secara simultan variabel umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

**Penelitian Kelima** dilakukan oleh Ningsih dan Windhiyani (2015) yang dimuat dalam jurnal ISSN: 2302-8556 Vol.12.3 *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (2015) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Operasi, Solvabilitas, dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, laba operasi, solvabilitas, dan komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Sampel yang digunakan sebanyak 60 perusahaan. Metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan metode *observasi non participant*, dengan teknik analisis linier berganda.

Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan variabel ukuran perusahaan, laba operasi, solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Secara simultan variabel ukuran perusahaan, laba operasi, solvabilitas, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

**Penelitian Keenam** dilakukan oleh Modugu, dan Eragbhe (2012) yang dimuat dalam jurnal ISSN 2222-2847 Vol.3.6 (2012) *Journal of Financial and Accounting* dengan judul "*Determinants of Audit Delay in Nigerian Companies Empirical Evidence*". Tujuan penelitian ilmiah ini adalah untuk mengukur sejauh mana *audit lag* di Nigeria dan mendirikan dampak atribut perusahaan yang dipilih pada *audit delay* di Nigeria.

Penelitian ini menggunakan 20 sampel perusahaan yang terdaftar di Nigeria, untuk tahun 2009-2011. Hasil dari data panel yang diperkirakan menggunakan *Regresi Ordinary Least Square* menunjukkan bahwa penentu utama dari *audit delay* di Nigeria termasuk koneksi *multinationality* perusahaan, biaya ukuran dan audit perusahaan yang dibayarkan kepada auditor. Oleh karena itu kami merekomendasikan bahwa badan hukum di Nigeria harus menyelidiki *audit delay* dan merumuskan kebijakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketepatan waktu laporan tahunan.

**Penelitian Ketujuh** dilakukan oleh Vuko dan Cular (2014) yang dimuat dalam *journal CRORR* Vol.5 (2014): 81-91 dengan judul "*Finding Determinants of Audit Delay By Pooled OLS Regression Analysis*". Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis KAP, opini audit, profitabilitas, *leverage*, persediaan

dan piutang terhadap total asset, nilai absolut dari total akrual, ukuran perusahaan dan komite audit serta *audit delay* sebagai variabel dependen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penundaan audit. Penelitian ini dilakukan pada sampel perusahaan yang terdaftar di Kroasia, untuk tahun 2008-2011. Penelitian ini menggunakan analisis regresi OLS gabungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit, profitabilitas, *leverage*, secara sistematis berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* di Kroasia.

**Penelitian Kedelapan** dilakukan oleh Apadore dan Noor (2013) yang dimuat dalam jurnal ISSN: 1833-3850 *International Journal of Business and Management* Vol. 8.15 (2013) dengan judul “*Determinant of Audit Delay and Corporate Governance in Malaysia*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan, Independensi Dewan komisaris, Independensi Komite Audit, Keahlian, Rapat, Ukuran, Investasi Audit Internal dan *Audit Delay*.

Penelitian ini menggunakan sampel 180 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2009-2010. Sampel dipilih acak dari 843 perusahaan populasi. Teknik analisis data menggunakan *analysis regresi* yang digunakan untuk memberikan bukti empiris dimana variabel memiliki ikatan yang kuat dengan keterlambatan laporan audit. Statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan persepsi yang lebih baik mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor, untuk menyelesaikan audit.

Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mengambil sekitar 100 hari untuk menyelesaikan laporan audit mereka masing-masing dengan maksimum dan minimum hari kerja 148 hari dan 26 hari. Ukuran komite audit, Konsentrasi kepemilikan, ukuran organisasi dan profitabilitas secara signifikan terkait dengan *Audit Delay*. Sedangkan Independensi Komite Audit, Rapat, Keahlian dan Jenis Auditor tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan *audit delay*.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Laporan Keuangan

#### 2.2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Wardiah (2016:89-90) adalah informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 paragraf ke-7 (2015) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Hery (2016:5) Laporan keuangan (*financial statements*) adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Urutan laporan keuangan berdasarkan penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk periode tertentu. Laporan laba rugi ini pada dasarnya memuat informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu laporan laba rugi merupakan hasil dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban.
2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering dinamakan sebagai laporan perubahan modal.

3. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan laporan ini tidak lain untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing aktivitas, yaitu mulai dari operasi, aktivitas investasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes to The Financial Statement*) catatan ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

### **2.2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan Laporan Keuangan Menurut Hery (2016:6) adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambilan keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 paragraf ke-12 (2015) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan laporan keuangan merupakan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, secara faktual, akurat, objektif dan informatif.

### **2.2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Menurut (SAK) Standar Akuntansi Keuangan (2015:5-7) Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

#### 1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

#### 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

#### 3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

#### 4. Dapat Dibandingkan

Penggunaan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan dengan kandungan informasi dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan mempunyai daya banding. Karakteristik relevan disini berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan secara tepat waktu.

#### 2.2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Hery (2016:4) informasi akuntansi dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda (bervariasi) tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pemakai internal (*internal users*) dan pemakai eksternal (*external users*).

Hery (2016:4) yang termasuk kedalam kategori pemakai internal, antara lain:

##### 1) Direktur dan *Manager* Keuangan

Untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditor (*bankir, supplier*) maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh temponya pinjaman/utang.

##### 2) Direktur operasional dan *Manager* Pemasaran

Untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan maka mereka

membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan (tren penjualan).

3) *Manager* dan *Supervisor* Produksi

Mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi, yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit.

Hery (2016:4) sedangkan yang termasuk dalam kategori pemakai eksternal, antara lain:

- 1) Investor (penanam modal), menggunakan informasi akuntansi investee (penerima modal) untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya.
- 2) Kreditor, seperti *supplier* dan *bankir*, menggunakan informasi akuntansi debitor untuk mengevaluasi besarnya tingkat resiko dari pemberian kredit atau peminjam uang.
- 3) Pemerintah, berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan (wajib pajak) dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara.
- 4) Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan *public corporation* (emiten) untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 5) Ekonom, Praktisi, dan Analis menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan lain sebagainya

## **2.2.2 Auditing**

### **2.2.2.1 Pengertian Auditing**

Pengertian *Auditing* menurut Hery (2016:10) adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam

rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian *Auditing* menurut Arens, *et al*, (2015:2) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pengertian *Auditing* menurut Mulyadi (2013) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Pengertian *Auditing* menurut Agoes (2012) adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan pada definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *auditing* merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif yang berkaitan untuk menentukan apakah pernyataan pihak yang di audit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, biasanya merujuk pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemakai informasi keuangan.

### 2.2.2.2 Jenis-Jenis Audit

Akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, antara lain (Arens, *et al*,2015:12):

#### 1. Audit Operasional (*Management Audit*)

Mengevaluasi *efisiensi* dan *efektivitas* setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhirnya audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.

#### 2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

#### 3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi Amerika Serikat atau internasional, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok organisasi itu.

### 2.2.2.3 Standar Audit

Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya (Hery, 2016:28).

Standar audit di Indonesia secara resmi mengadopsi *Internasional Standards on Auditing* (ISA) pada tahun 2013-2014 (Tuanakotta, 2015:56-60), antara lain:

#### 1. Penekanan pada Risiko

Audit berbasis ISA tidak lain dari audit berbasis risiko (*risk-based audit*). SPAP tidak mengabaikan aspek risiko. Bahkan istilah-istilah risiko seperti

*inherent risk, control risk, detection risk*, dan *audit risk* sudah dikenal dalam SPAP.

## 2. Standar Berbasis Prinsip

Standar-standar terbitan IFAC adalah standar berbasis prinsip (*principles-based standards*), yang merupakan perubahan dari SPAP sebelumnya yang berbasis aturan (*rules-based standards*).

## 3. Pengukuran Berkesan Eksak

Seperti dijelaskan diatas, aturan (*rules*) yang jelimet memberi kesan eksak. Contoh, jika materialitas (*materiality*) ditetapkan 5% dari jumlah aset atau 3% dari laba setelah pajak, maka salah saji di bawah *persentase* tersebut dianggap tidak material. Dalam bab mengenai *materiality* akan dijelaskan kekeliruan pengukuran semacam ini, yang tidak memberi peluang untuk menerapkan kearifan profesional.

## 4. Gunakan Kearifan Profesional

Dalam pembahasan di atas, berulang-ulang dikemukakan bahwa ISA menekankan penerapan kearifan profesional. Apa ciri bahwa penugasan audit menggunakan kearifan profesional? Setiap auditor akan mengklaim bahwa ia telah menggunakan kearifan profesional. Hal yang paling mudah diamati ialah keterlibatan auditor yang berpengalaman, auditor yang mumpuni. Dalam praktik akuntansi publik, ini berarti keterlibatan *partner* yang mempunyai pengalaman (jam terbang dan kepakaran dalam industri tertentu atau jenis audit tertentu), pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan penugasannya, dan ciri-ciri kepribadian tertentu seperti sikap skeptis (*professional skepticis mantau kewaspadaan profesional*).

## 5. Senantiasa Terapkan Kewaspadaan Profesional

Sebagaimana halnya dengan *professional judgement, professional skepticism* atau kewaspadaan profesional juga bukan konsep atau gagasan audit yang baru dikenal, atau hanya dikenal dalam ISA. Makna baru dalam konsep

kewaspadaan professional ialah, auditor sejak awal (bahkan sebelum memutuskan menerima penugasan audit) harus waspada, calon kliennya pun bisa membohonginya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan.

#### 6. Pengendalian Internal

ISA menjadikan sistem pengendalian internal suatu kewajiban yang harus dipenuhi entitas. Entitas wajib menetapkan, membangun, memelihara, dan mengimplementasikan lingkungan dan sistem pengendalian internal. Jika lingkungan dan sistem pengendalian internal tidak ada atau sangat tidak memadai, risiko audit menjadi sangat tinggi, karena itu, auditor wajib menolak penugasan audit ini.

#### 7. *Those Charged with Governance* (TCWG)

Istilah yang panjang ini “*those charged with governance*” (TCWG) dapat ditemukan dalam banyak ISAs. ISAs menekankan berbagai kewajiban entitas dan manajemen. Namun, perkembangan dalam tata kelola pada dua dekade terakhir menekankan perlunya orang atau lembaga dengan wewenang yang cukup dalam mengawasi entitas. Mereka inilah yang disebut TCWG.

### **2.2.3 Audit Delay**

Pengertian *Audit Delay* menurut Angruningrum dan Wirakusuma (2013) adalah selisih waktu antara akhir tahun laporan keuangan dengan tanggal penyelesaian proses audit yang tertera dalam laporan keuangan. Lamanya waktu audit ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai tanggal tertera pada laporan auditor independen.

.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/ pasal 7 ayat 1 yang berisi: “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun

buku berakhir”, sehingga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*go public*) wajib untuk mempublikasikan laporan tahunan setelah berakhirnya tahun buku periode tertentu.

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang terpenting terutama bagi perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Keterlambatan pelaporan keuangan yang telah diaudit secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan karena keterlambatan informasi yang diterima dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal.

## **2.2.4 Profitabilitas**

### **2.2.4.1 Pengertian Profitabilitas**

Menurut Hery (2016:192) *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya, yang digunakan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Utari, et al, (2014:63) Profitabilitas ialah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (*revenue*) dan mengurangi semua beban (*expenses*) atas pendapatan.

### **2.2.4.2 Pengukuran Profitabilitas**

Profitabilitas sebagai faktor yang juga mempengaruhi *audit delay*. Jadi, Profitabilitas merupakan indikator keberhasilan kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas dapat dilihat dari tingkat rasio *Return On Asset* (ROA) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba bagi perusahaan tersebut. Tingkat keuntungan digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Asset* dengan rumus (Sitanggang, 2013:30).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

## 2.2.5 Ukuran Perusahaan

### 2.2.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan total aktiva perusahaan, ekuitas, nilai perusahaan, dan lain sebagainya. Perusahaan yang mempunyai total asset yang besar tentunya memiliki sumber daya yang besar, sistem informasi yang canggih dan memiliki lebih banyak staf akuntansi serta memiliki sistem pengendalian internal yang kuat (Zebriyanti dan Subardjo, 2016).

Armansyah (2015) ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan total asset perusahaan, ekuitas, nilai perusahaan, dan lain sebagainya, perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar, sistem informasi yang canggih serta memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut (Yulianti, 2012:53):

1. Perusahaan besar (*Large Companies*)

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar per tahun.

2. Perusahaan menengah (*Medium Companies*)

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar Rp 11 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar per tahun.

3. Perusahaan kecil (*Small Companies*)

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar per tahun.

### 2.2.5.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, rata-rata total aset, dan ekuitas. Salah satu faktor yang memengaruhi *audit delay* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan, ditunjukkan oleh total aktiva, semakin besar aktiva suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam, maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat. Semakin besar perusahaan maka perusahaan itu memiliki pengendalian internal yang baik sehingga pengauditan laporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Asset}$$

## **2.2.6 Komite Audit**

### **2.2.6.1 Pengertian Komite Audit**

Tugiman (2013:72) menjelaskan komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas tugas auditor eksternal dan internal. Di dalam perusahaan, Komite Audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.

Luthfiany (2015) menjelaskan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan audit, kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya anggota Komite Audit hanya terdiri atas anggota Dewan Komisaris yang bukan termasuk manajemen perusahaan (tidak terlibat dalam menjalankan operasi perusahaan).

### **2.2.6.2 Latar Belakang Terbentuknya Komite Audit**

Perkembangan teknologi setelah revolusi industri memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian dunia. Dengan perkembangan teknologi memungkinkan diadakannya mekanisme dan perubahan di berbagai bidang. Pola kerja lebih cepat dan tepat sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan produk yang dihasilkan lebih optimal. Perubahan ini berdampak pada ekspansi usaha yang semakin cepat, yang mana mengakibatkan semakin besar modal yang dibutuhkan untuk melakukan penambahan modal secara *go public*.

Menurut Tugiman (2013:73) kepemilikan saham dikuasai oleh masyarakat luas, baik nasional maupun internasional, sehingga berakibat kepada sulitnya pengambilan keputusan pada tingkat tinggi. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, tidak mungkin diadakan sesering mungkin karena beragamnya pemilik. Di lain pihak, banyak wewenang yang harus diputuskan oleh RUPS diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
2. Mengesahkan pertanggungjawaban atas laporan tahunan.
3. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
4. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris.
5. Menyetujui pengeluaran saham baru.
6. Penunjukan audit internal.
7. Menyetujui dan mengesahkan revisi rencana kerja dan anggaran sampai dengan batas tertentu.

Oleh karena itu, perlu dilakukan deregulasi wewenang sehingga sebagian tugas dan wewenang RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, Tugas RUPS dibatasi hanya membahas hal-hal yang sangat signifikan menurut (Tugiman, 2013:74) yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban laporan keuangan.
- 2) Perubahan anggaran dasar perusahaan.
- 3) Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Untuk menangani pekerjaan Dewan Komisaris, khususnya mengenai masalah pengendalian, dibentuklah komite, yang beranggotakan komisaris yang tidak terlibat dalam manajemen serta dapat dibantu oleh pihak luar yang independen, komite itu dinamakan komite audit.

*“An audit committee is required for all companies listed on the New York stock exchange”.*

Tugiman (2013:74) keuntungan yang dicapai dengan dibentuknya suatu komite audit, yaitu:

1. Penggabungan keahlian khusus yang dimiliki para anggota komite audit yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau masalah tertentu.
2. Dapat memfokuskan diri secara intensif pada pokok permasalahan, sehingga masalah dapat diselesaikan dalam periode yang relatif singkat.
3. Masalah-masalah yang berlanjut untuk periode waktu yang lama dapat terus diawasi.
4. Dapat menimbulkan perasaan terlibat dan partisipasi yang tinggi dalam diri anggota komite, karena mereka membagi tanggungjawab yang sama atas penyelesaian masalah.
5. Anggota dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama.

Dalam hal ini untuk kepentingan Dewan Komisaris, pembentukan Komite Audit kelihatannya berarti suatu perusahaan/peningkatan penugasan dalam arti:

1. Aktif dalam mekanisme pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor maupun yang dilakukan oleh internal auditor.
2. Aktif dalam melakukan penelaah terhadap kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan khususnya mengenai laporan keuangan.

### **2.2.6.3 Persyaratan Anggota Komite Audit**

Surat Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai berikut:

- a) Pedoman Pembentukan Komite Audit:
  1. Struktur Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang

berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

b) Persyaratan keanggotaan Komite Audit:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

#### **2.2.6.4 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Surat Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 4) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **2.2.7 Ukuran Kantor Akuntan Publik**

### **2.2.7.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik**

Tuanakotta (2015:12) menjelaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang. Kantor Akuntan Publik sering di kategorikan

berdasarkan ukuran. Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) merupakan besar kecilnya KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan mengelompokkan KAP menjadi KAP *Big Four* dan non *Big Four*. *The Big Four* adalah jaringan KAP global yang secara kolektif menduduki peringkat pertama dunia, adapun KAP *Big Four* terdiri atas: Deloitte & Touche Tohmatsu, Ernest & Young, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

Arens, *et al*, (2015:12) Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh seluruh perusahaan yang terbuka (*go public*), sebagian besar dari perusahaan yang tergolong besar, dan banyak pula dari perusahaan kecil serta organisasi nirlaba. KAP sering pula disebut dengan istilah *external auditor* atau *independent auditor* untuk membedakannya dari *internal auditor*.

KAP *Big Four* secara umum dianggap sebagai penyedia laporan audit yang berkualitas tinggi, dan memiliki reputasi yang tinggi pada lingkungan bisnis, dan akan menjaga independensinya untuk mempertahankan cita mereka. Sebaliknya, mereka juga akan menjaga independensinya agar dapat mempertahankan klien.

KAP *Big Four* adalah empat perusahaan akuntansi internasional terbesar dan perusahaan jasa profesional yang bergerak dalam bidang audit, dan konsultasi untuk perusahaan perdagangan dan swasta. Adapun yang termasuk dalam *Big Four* sebagai berikut:

1. Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang berafiliasi dengan KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan hingga akhir tahun 2003, kemudian tahun 2004 berganti afiliasi dengan KAP Haryanto Sahari & Rekan hingga tahun 2008, kemudian tahun 2010 berganti afiliasi dengan KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan.
2. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim hingga tahun 2004, kemudian tahun 2006 berganti afiliasi dengan KAP Osman Ramli Satrio & Rekan, kemudian tahun 2007 berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Rekan.

3. Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja hingga tahun 2005, kemudian tahun 2006 berubah menjadi Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, kemudian tahun 2010 berubah menjadi Purwantono, Suherman & Surja.
4. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjadja.

### 2.2.7.2 Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Arens, *et al*, (2015:12) menyatakan bahwa ada empat kategori ukuran yang menggambarkan Kantor Akuntan Publik :

1. Kantor Akuntan Publik Internasional (*International Firm*)  
Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut Kantor Akuntan Publik Internasional “Empat Besar”.Empat KAP ini adalah Deloitte & Touche Tohmatsu, Ernest & Young, PricewaterhouseCoopers, dan KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*).Keempat KAP ini mempunyai cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia.
2. Kantor Akuntan Publik Nasional (*National Firm*)  
Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang disebagian besar kota utama. Ketiga KAP tersebut adalah *McGladrey & Pullen*, *Grant Thornton*, dan BDO Seidman. Setiap kantor nasional bekerjasama dengan kantor-kantor di negara lain karena mempunyai kemampuan taraf internasional.
3. Kantor Akuntan Publik Lokal Besar dan Regional (*Regional and Large Local Firms*)  
Kantor regional dan kantor lokal yang besar bersaing mendapatkan klien dengan KAP lainnya, termasuk KAP Empat Besar dan kantor nasional. Banyak kantor regional dan lokal yang besar bekerjasama dengan asosiasi

KAP guna berbagi sumber daya untuk hal-hal seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan.

#### 4. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil (*Small Local Firm*)

Lebih dari 95% dari total kantor akuntan publik di Amerika Serikat hanya memiliki kurang dari 25 profesional dalam sebuah kantor. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik.

### 2.2.7.3 Bentuk Usaha Kantor Akuntan Publik

Menurut Yusuf (12:2013) bentuk usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang dikenal menurut hukum ada dua yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk usaha sendiri. Kantor Akuntan Publik bentuk ini menggunakan nama Akuntan Publik yang bersangkutan.
2. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk usaha kerjasama. Kantor Akuntan Publik bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan atau partner dalam Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

## 2.3 Karakteristik Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*

Perusahaan akan cenderung ingin mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara lebih cepat apabila memiliki profitabilitas yang baik yang menunjukkan prestasi perusahaan. Amani (2016), dan Saemargani (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini merupakan berita baik yang dapat memberikan hal positif kepada para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan Berdasarkan penjelasan tersebut, maka

dapat disusun hipotesis: Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

### **2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay***

Manajemen dengan skala besar cenderung diberikan insentif untuk mempercepat penerbitan laporan keuangan auditan disebabkan perusahaan berskala besar dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah sehingga cenderung menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan keuangan auditan lebih awal. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan, maka *audit delay* nya semakin pendek. Penelitian Ningsih dan Windhiyani (2015) dengan sampel yang digunakan sebanyak 60 perusahaan yang diteliti, menyatakan bahwa ukuran perusahaan dengan indikator total aset berpengaruh signifikan terhadap variabel *audit delay*. Candraningtiyas dan Wahyuni (2015) dengan sampel yang digunakan 29 perusahaan dari 41 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015, menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Amani (2016) dengan sampel yang digunakan 41 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

### **2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay***

Keberadaan komite audit sebagai salah satu fasilitator bagi dewan komisaris yaitu memastikan bahwa struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap melaksanakan praktik perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian telah terlaksana dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013)

menghitung jumlah total anggota komite audit secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis:

H3: Komite Audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

#### **2.3.4 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay***

KAP besar umumnya memiliki sumber daya yang banyak dan lebih baik. Sistem yang digunakan lebih canggih dan akurat karena biasanya didukung dengan kerjasama internasional dengan sumber dana yang besar. Jadi kesimpulannya adalah dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya KAP besar lebih cepat dibandingkan KAP kecil karena KAP besar memiliki sumber daya yang banyak dan lebih baik, serta sistem yang digunakan juga lebih canggih. Penelitian Saemargani (2015) sampel yang digunakan sebanyak 14 perusahaan dari perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis:

H4: Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

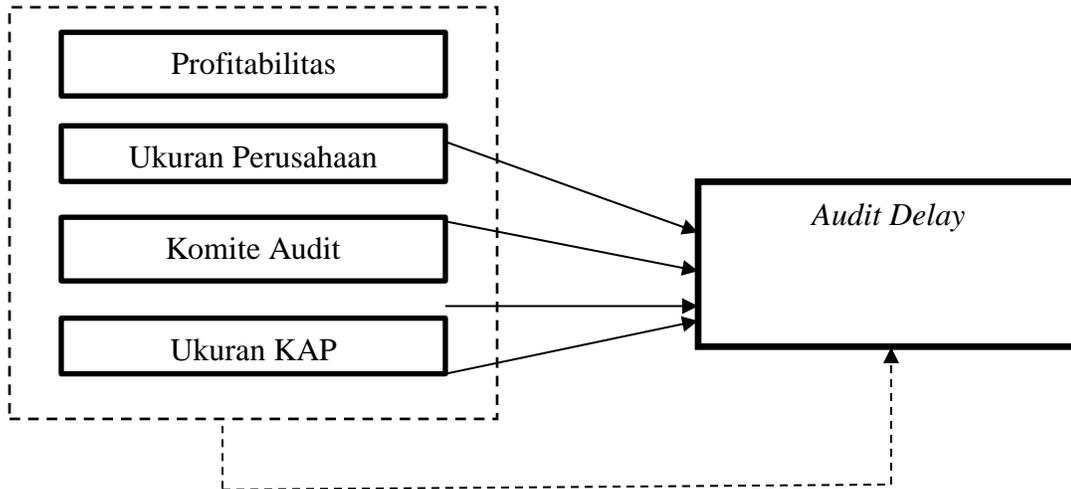
#### **2.3.5 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *Audit Delay***

Berdasarkan keterkaitan antar masing-masing variabel serta hasil dari penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Dengan demikian variabel-variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis:

H5: profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan kantor akuntan publik berpengaruh positif simultan terhadap *audit delay*.

## 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan dari uraian sebelumnya serta pengembangan hipotesis, maka dalam penelitian ini kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 2.1



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**

**Keterangan:**

- > = Pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen
- - - - -> = Pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen